PENANGANAN KONFLIK DI SAMBAS, KALIMANTAN

(Conflict Management in Sambas, Kalimatan)

H.M. Fadhil Nurdin

Abstract

This paper is part of field reseach on the conflict management in Sambas, Kalimantan, Indonesia. Managing a conflict requires the comprehensive understanding, dynamic programs, clear job description from the governmental institutions, and synergic coopertion between the central and regent government that involved local society's cooperation. This paper deploys the socio-political model of conflict management which anticipates and, thus, affords to perevent the conflict in the regency.

Abstrak

Tulisan ini ringkasan dari sebahagian kajian tentang penanganan konflik di Sambas, Indonesia. Dalam penanganan konflik diperlukan pemahaman dan dinamik melalui tahapan kegiatan dan pembahagian kerja yang jelas dari instansi pusat - daerah yang bersinergi dan koordinasi secara terpadu, dan melibatkan kerjasama dengan masyarakat lokal. Penanganan konflik ini digambarkan melalui model sosial politik yang dapat berantisipasi secara dini sekali gus mencegah konflik di daerah.

PENGENALAN

Dalam memahami konflik, dipandang sebagai suatu konsepsi dan teori yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membahaskan masalah konflik yang wujud dalam kehidupan masyarakat. Memahami fenomena konflik, Montagu dan Matson menyatakan: *This contemporary, vague-which has been variously labeled "terrorist chick", is cruelty cult, and just plain "Punk" is not limited to the movie built runs like a crimson thread throughout the realm of popular culture all the way.*[1] Konflik mahupun kekerasan dapat bersifat *konkrit* dan *abstrak*. Konflik yang konkrit cenderung mudah diupayakan alternatif penyelesaian yang tepat. Sebaliknya konflik abstrak relatif lebih sulit untuk diupayakan penyelesaiannya. Konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan; dampak dalam organisasi yakni *fungsional* dan *disfungsional*, berdasarkan posisi para pelaku yakni *horisontal* dan *vertikal*, berdasarkan *sifat dari para pelaku* yakni *tertutup* dan *terbuka*, berdasarkan *lamanya konflik* yakni *sesaat* dan *berkepanjangan*, serta berdasarkan *rencana target* yakni *sistematis* dan *non-sistematis*. Bagaimanapun, faktor *latar belakang agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya*, dan bahkan *posisi wilayah geografi* berpengaruh terhadap terjadinya konflik. Dari konflik, dapat dipelajari berbagai hal untuk menghasilkan situasi dan tahap yang lebih baik di masa-masa selanjutnya.

Menangani Konflik: Model Sosial Politik

Dalam menangani konflik, *Yash Ghai* - Profesor Hukum Publik - Hongkong University, menyatakan: "ada prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh segenap komponen masyarakat yang bertikai, iaitu *kepemimpinan yang berwawasan ke depan* dan *keinginan kuat segenap komponen masyarakat untuk menyudahi konflik yang terjadi".*[2] Keinginan masyarakat untuk menyudahi konflik, dapat dilihat dari berbagai indikator *Social Capital* yang meliputi *kesediaan mereka untuk saling mengerti, tolong menolong, menghormati hak orang lainnya, menerima perbezaan dan prulitas serta kesediaan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sosialnya*. Penanganan konflik dapat juga dilakukan dengan mengintensifkan mahupun menekan konflik.

Dalam menangani konflik, terdapat beberapa andaian yang menopang teori integrasi yang juga terlukis dalam teori struktural fungsional Parsons dan lainnya:

- *Setiap masyarakat yang secara relatif tetap, struktur unsur-unsurnya relatif stabil;*
- *Setiap masyarakat tersusun dari unsur-unsur yang terintegrasi secara baik;*
- *Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, yakni memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan keutuhannya sebagai sebuah sistem;*
- *Setiap fungsi struktur sosial didasarkan atas konsensus terhadap nilai-nilai di antara anggota-anggotanya.*[3]

Tugas yang paling penting dalam menangani konflik adalah *melakukan diagnosis* dan *mengatasi konflik*. Teknik penyelesaian konflik antara lain *problem solving*, *tujuan tinggi, perluasan sumber daya, penghindaran, pengurangan konflik, kompromi, pemerintah yang otoritet, mengubah struktur variabel, dan mengidentifikasikan musuh atau pesaing bersama*. Dalam *problem solving process*, meliputi *identifikasi dan seleksi masalah; analisis masalah; alternatif penyelesaian; memilih dan merencanakan penyelesaian; implementasi penyelesaian; dan evaluasi terhadap penyelesaian.* Menangani suatu konflik perlu berbagai pendekatan yang hingga kini dikenal beberapa istilah:[4]

- *Pencegahan konflik*, secara umum mengacu pada strategi mengatasi konflik laten dengan harapan dapat mencegah meningkatkannya kekerasan.
- *Penyelesaian konflik*, mengacu pada upaya pengakhiran kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
- *Pengelolaan konflik* untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi para pihak yang terlibat.
- *Resolusi konflik* pada umumnya menangani akar persoalan dan berusaha membangun hubungan baru lebih permanen di antara para pihak. Pendekatan ini bukan hanya untuk penyelesaian konflik, tetapi juga mencapai resolusi dari berbagai akar persoalan.
- *Transformasi konflik*, sangat popular dan bersifat menyeluruh serta membutuhkan komitmen. Pada umumnya mengatasi sumber-sumber konflik sosial politik yang lebih luas dan mengubah aspek-aspek negatif menjadi aspek-aspek positif.

Untuk menangani konflik dan memudahkan proses analisis masalah, Tim Pengkaji Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia (Polhukam, 2005) menyusun model Sosial Politik dalam penanganan konflik seperti dalam gambar 1.

Gambar 1:
Penanganan Konflik: Model Sosial Politik

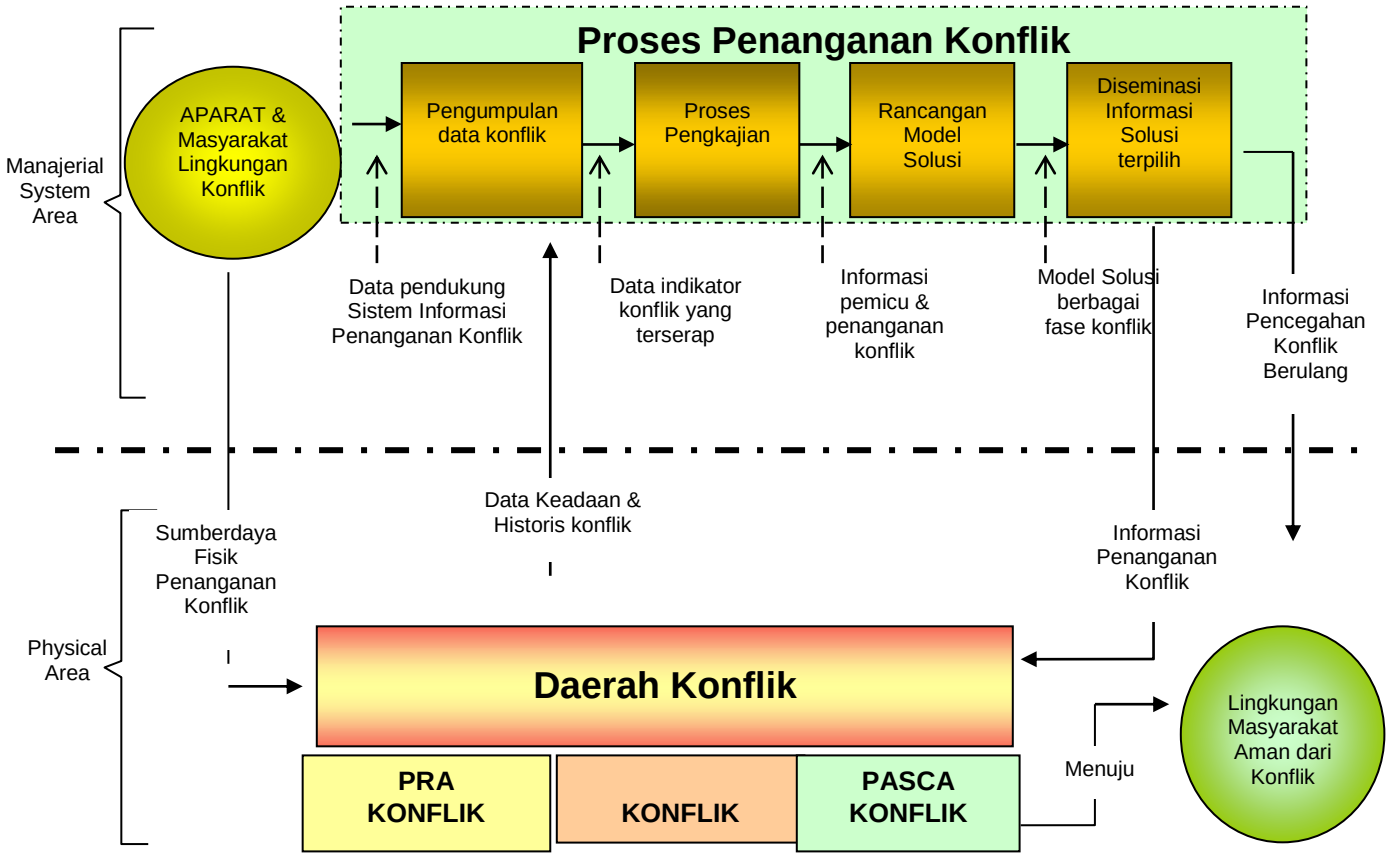

Sumber: Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia (2005).

Dari gambaran di atas, upaya untuk menanggulangi konflik dapat dilakukan melalui beberapa asumsi tindakan sebagai berikut :

- Diciptakan suatu kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara.
- Diperlukan adanya ruang publik yang bebas yang berguna sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari seluruh warga negara melalui wacana dan praktis yang berkepentingan publik , dan
- Perlu diupayakan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak memiliki sifat intervensi.[5]

DINAMIK PENANGANAN KONFLIK

Penanganan dan Layanan bagi Korban

Penanganan Korban Kerusuhan

Penanganan korban kerusuhan akibat konflik merupakan upaya penyelamatan, perlindungan serta pemulihan korban bencana yang meliputi kegiatan *pemberian bantuan darurat, rehabilitasi, rekonsiliasi, penempatan semula, dan pemberdayaan*. Tujuannya untuk menciptakan kembali kesejahteraan bagi seluruh korban dan memastikan para korban, khususnya kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh bantuan fizik dan sosio-psikologi; dan membantu pembentukan kembali dan pengembangan struktur masyarakat korban bencana yang dapat digunakan dalam pengurusan program pemberian bantuan, dan yang dapat mengurangi masalah ketergantungan jangka panjang.

Dalam menangani korban kerusuhan antar etnik, perlu difahami, pemberian bantuan jangan terkesan tidak adil, seperti yang mencuat pada tindakan penegak hukum dalam mengamankan konflik Madura-Melayu; Suku Melayu menganggap tindakan pihak keamanan tidak adil; Suku Melayu menganggap pihak Departemen Sosial tidak adil kerana yang diberikan bantuan itu hanya warga Madura, sedangkan warga Melayu yang juga menjadi korban kerusuhan tidak diperhatikan. Kegiatan utama yang dilakukan, dapat dilihat pada Jadual 1 berikut ini.

Jadual 1: Kegiatan Utama dalam Penanganan Korban Kerusuhan

Penentuan Status Korban Bencana	Pada awal keadaan darurat, apabila terjadi gelombang arus massa, yang penting dilakukan adalah bagaimana memperlakukan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karenanya kecepatan intervensi untuk memastikan perlindungan menjadi prioriti utama. Dalam keadaan demikian, penentuan status sebagai korban bencana dapat dilakukan atas dasar "*prima facie*", yakni penentuan secara berkelompok atau melalui penentuan status secara perseorangan.
Layanan dan Bantuan Darurat	layanan dan bantuan darurat dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan tempat penampungan sementara, pencarian dan penyatuan kembali anggota keluarga yang terpisah, bantuan pangan, sandang, ubat-ubatan, air bersih dan sanitasi sesuai dengan ukuran keperluan minimum
Ketahanan dan *Crisis Centre*	Penanganan terhadap korban bencana yang mengalami tekanan sosio-psiklogi, dapat berupa Ketahanan "*Development Projects*" yang lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial mahupun *Crisis Centre* melalui "*Psycho-social Projects*" yang mengutamakan kan intervensi krisis atau intervensi mikro bernuansa psikologi.
Pemulangan Korban Kerusuhan	Sebahagian besar keadaan darurat pengungsi dapat diselesaikan melalui pemulangan secara sukarela. Proses pemulangan tersebut harus berdasarkan pada prinsip "*non-refoulement"* yakni bahawa mereka tidak dipulangkan secara paksa.
Relokasi Korban	Relokasi merupakan alternatif, ketika korban kerusuhan tidak dapat kembali ke tempat asal, karena di tempat asalnya tersebut dinilai masih terdapat ancaman yang membahayakan bagi keselamatan dan ancaman yang berkepanjangan. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemilihan daerah untuk dijadikan tempat relokasi sangat penting dan mendasar. Para korban bencana itu harus dilibatkan seawal mungkin dan secara seimbang, sehubungan dengan rencana relokasi. Dalam praktiknya, kesepakatan harus dicapai antara kebutuhan para korban bencana dengan faktor-faktor dari luar, baik secara praktis mahupun secara politik.
Pemulihan Korban Kerusuhan	Kondisi kehidupan para korban bencana selama di tempat penampungan sementara dan di tempat relokasi, berada dalam kondisi tidak normal akibat terputusnya mata pencarian dan habisnya sumber-sumber bawaan. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga-lembaga donor lainnya dimungkinkan untuk memberikan bantuan dana untuk usaha ekonomis produktif baik secara perorangan mahupun kelompok bagi kepala-

	kepala keluarga dari korban bencana, dengan melibatkan tenaga-tenaga pendamping yang terdidik dalam pelaksanaan pemulihan tersebut.
Rekonsiliasi	Tugas pemerintah pusat-daerah, untuk melakukan rekonsiliasi, perlu pendekatan sosial-budaya, HAM, dan hukum terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat yang berpengaruh pada masing-masing pihak untuk mengupayakan resolusi damai, sebagai upaya penyelesaian status korban bencana.

Sumber: Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (2005).

Penanganan Bencana Konflik

Dalam penanganan bencana konflik, dapat didasarkan pada tiga sistem, yang dalam praktiknya, ketiga sistem ini saling terkait antara satu sama lainnya, dan dapat pula memberikan kekuatan, makna, dan perubahan yang bererti terhadap hasil yang dilakukan melalui kerjasama semua pihak terkait.

Jadual 2: Penanganan Bencana Konflik

Sistem pelaksana perubahan	Terdiri dari pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan-layanan terhadap korban bencana. Mereka bertanggung jawab mengambil inisiatif untuk membuat senario penanganan ataupun layanan terhadap korban bencana. Pihak-pihak yang seharusnya menjadi anggota sistem pelaksana perubahan di antaranya Dinas Kesihatan, Sosial, Kementerian Pemukiman dan Prasraana Wilayah., Palang Merah Indonesia (PMI), Kepolisian dan kaki tangan keamanan lainnya, serta pekerja-pekerja sosial.
Sistem Sasaran	Terdiri dari para korban bencana yang mengungsi, masyarakat lokal sekitar tempat pengungsian dengan tokoh-tokohnya, LSM-LSM yang relevan, organisasi-organisasi lokal, para pemberi dana, dll. Sistem ini perlu di motivasi agar terlibat dan merasa berkepentingan dalam semua kegiatan penanganan bencana.
Sistem Pendukung Pelaksanaan	Semua pihak atau hal-hal yang sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penanganan/layanan bagi korban bencana. Sistem pendukung dapat terdiri dari kaki tangan keamanan, sukarelawan baik yang berasal dari masyarakat lokal mahupun dari luar, sumber-sumber alam seperti sungai untuk MCK, bangunan-bangunan yang dapat digunakan untuk penampungan para pengungsi, dapur umum, sarana air bersih, dll.

Sumber: Tumanggor, Rusmin, Jaenal Aripin, & Imam Soeyoeti (2004); Bappeda Provinsi Kalimantan Barat (2004); Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (2005). Dinas Sosial Kabupaten Sambas (2004).

Metode dan Teknik Penanganan Korban Konflik

Metode dan teknik penanganan korban konflik adalah preskripsi yang terurus untuk melakukan tindakan. Dalam S*ocial engineering,* model-model yang relevan dan sering digunakan dalam penanganan konflik, antara lain, *Model Krisis* (preskripsi untuk menyampaikan informasi untuk menenangkan korban bencana, dan mengurangi perasaan-

perasaan ketidakpastian), *Berpusat pada Tugas* (preskripsi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan), dan Pemulihan (preskripsi untuk membantu korban konflik guna memperoleh kembali daya/kekuatan yang rosak karena konflik).[6]

Pendekatan yang relevan dengan masalah pengungsian akibat konflik adalah *pendekatan provisi sosial (*penyediaan pelbagai perkhidmatan yang diperlukan oleh para korban bencana di tempat pengungsian), seperti, bahan makanan, penampungan, layanan kesihatan, MCK, dan lain-lain.[7] *Pendekatan sistem* (digunakan untuk mengelola pelayanan dengan basis keluarga, sehingga korban diupayakan agar bersatu dengan anggota-anggota keluarganya yang lain.[8] Kesatuan keluarga di antara korban yang tinggal di pengungsian akan menguatkan mental untuk dapat bertahan dalam kondisi sulit; serta akan mengukuhkan kekuatan mereka untuk mencari penyelesaian bersama. Penyelesaian bersama inilah yang dapat lebih efektif untuk keluar dari kondisi sulit; kebersamaan adalah kekuatan), dan *pendekatan behavioristik* (penanganan kelakuan yang bermasalah akibat situasi yang sangat menekan - karena situasi konflik). Pendekatan ini didasarkan pada kultur korban.[9]

Metode dan teknik penanganan bencana yang digunakan di Kabupaten Sambas, prosesnya terdiri dari tahap-tahap *intake, penilaian, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, penilaian dan penyeliaan*. Alat yang digunakan dalam penanganan korban konflik ini antaranya: *a)* alat-alat untuk *recording*, seperti *tape recorder, handy camp, photography camera*; *b) Filing cabinet* untuk arkib pencatatan kasus; *c)* alat-alat permainan untuk anak-anak, seperti bola, balon, alat permainan untuk pendidikan, *puzzle*, dll; *d)* makanan spesifik untuk anak-anak; dan e) ruang kaunseling. *Indikator* yang dijadikan penilaian keberhasilan layanan, beberapa di antaranya:

(a) Kebutuhan gizi korban bencana terpenuhi.
(b) Sistem pendukung tersedia; saran MCK, air bersih, tenda (untuk pengungsi, untuk ruang kesihatan, untuk ruang kaunseling), dapur umum.
(c) Masalah-masalah sosial-ekonomi teratasi.
(d) Anak-anak berkumpul dengan keluarganya.
(e) Ada partisipasi dari korban bencana dan dari masyarakat lokal.
(f) Kontinuiti pelayanan dapat dijaga dan lancar, tidak terjadi statik.
(g) Lingkungan pengungsian aman, tidak terjadi kriminil, tindak kekerasan, dll.
(h) Pasca bencana, korban dapat kembali ke rumahnya atau mendapat tempat tinggal lain, serta dapat meneruskan kehidupannya secara normal.[10]

Pencegahan dan Penguatan Kapasiti Penanganan

Pencegahan Korban Konflik

Pencegahan korban Konflik adalah proses mencegah terjadinya konflik, menghambat perkembangan konflik agar tidak lebih luas, serta menghindari terulangnya kembali terjadinya konflik. Pencegahan ini merupakan tindakan-tindakan untuk menghambat/ menghilangkan bahaya yang menyebabkan terjadinya konflik yang mempunyai akibat rosaknya kehidupan masyarakat. Secara lebih terperinci, pencegahan ini untuk:

- Menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik yang akan terjadi di wilayah setempat.
- Mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik.

- Menghindari terulangnya kembali konflik.
- Menghambat perkembangan terjadinya konflik.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya konflik (lihat pada jadual 3).

Jadual 3:
Pencegahan Konflik

Kategori Pencegahan	Upaya Nyata
Menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik di suatu wilayah	➢ Menguatkan ideologi nasionalis sebagai bangsa yang sama dan negara yang sama. ➢ Pembauran alami dan sistematis dalam pengawasan ketat mempunyai kemudahan kesamaan kultur. ➢ Pembauran religi dan kekeluargaan dalam bentuk perkahwinan silang.
Mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan bencana	➢ Melakukan penyuluhan sosial terhadap pendatang. ➢ Membuat aturan yang jelas dalam semangat keadilan dalam berusaha dan penguasaan sektor-sektor tertentu, misalnya, ekonomi, politik. ➢ Menguatkuasakan aturan yang sama dalam penegakan hukum. ➢ Akulturasi budaya dalam kesepakatan aturan yang mengikat berbagai pihak yang terlibat. ➢ Mempererat silaturahmi di antara tokoh masyarakat dan anggota masyarakat. ➢ Menciptakan kegiatan-kegiatan bersama yang dieksport dalam media publikasi yang tersebar.
Menghindari terulang kembali konflik	➢ Mengkaji ulang akar permasalahan konflik lalu untuk dijadikan pedoman pemersatuan. ➢ Menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu kembali konflik. ➢ Mengeksport berbagai kegiatan bernuansa perdamaian di antara kedua belah pihak. ➢ Menjaga pendedahan berbagai peristiwa/insiden kecil yang melibatkan pihak-pihak yang pernah bertikai. ➢ Penegakan hukum yang berkeadilan dan *transparan*.
Menghambat perkembangan terjadinya konflik	➢ Penempatan warga dalam kategori perbezaan etnik, agama, ideologi, dsb. ➢ Menjaga sentuhan langsung bernuansa rawan kepentingan di antara suku yang berbeza. ➢ Mempertinggi intensiti monitor dari pemerintah. ➢ Penegakan hukum *sedini* dan secepat mungkin.

Sumber: Tumanggor, Rusmin, Jaenal Aripin, & Imam Soeyoeti (2004); Bappeda Provinsi Kalimantan Barat (2004); Dinas Sosial Kabupaten Sambas (2004); Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia (2005).

Penguatan Kapasiti dalam Pencegahan

Organisasi Pelaksana

Dalam pencegahan konflik, perlu ditentukan suatu sistem atau organisasi pelaksana sebagai upaya untuk memperkuat kapasiti dalam pencegahan konflik. Upaya ini antara lain terdiri dari: Pemerintah Pusat dan Instansi Pusat terkait seperti Departemen Sosial, Departtemen Kesehatan, Badan Kordinasi Nasional, dsb. Di tingkat provinsi dan kabupaten

kota, terdiri dari: instansi pemerintah daerah terkait seperti Gabenor, Bupati/Walikota, Satuan Kordinasi Pelaksana, Satuan pelaksana, dsb. Selain itu, dilibatkan juga organisasi sosial kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga nasional & internasional yang bergerak di bidang penanganan konflik.

Dalam menentukan kegiatan utama dalam pencegahan, antara lain dilakukan: penyuluhan sosial tentang bencana akibat konflik, dimaksudkan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap bencana konflik serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Dari kegiatan ini diharapkan terjadi perubahan perilaku dari masyarakat, antara lain dapat dilakukan melalui kampanye tentang bencana akibat konflik, mengupayakan penyedaran serta penggalang partisipasi masyarakat dalam setiap permasalahan bencana konflik, sekali gus memantapkan ketahanan sosial masyarakat dengan mengupayakan dan memperkuat organisasi ataupun kelompok yang ada di tengah masyarakat dengan segala potensi yang dimilikinya.

Sistem Sasaran dan Pendukung Pelaksanaan dalam Pencegahan

- Individu-individu di daerah rawan konflik
- Keluarga-keluarga di daerah rawan konflik
- Kelompok organisasi kemasyarakatan di daerah rawan konflik
- Sumber daya alam dan potensi wilayah
- Lembaga lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan konflik
- Kepedulian masyarakat pada masalah konflik[11]

Teknologi Layanan dalam Pencegahan

Model yang digunakan untuk mencegah konflik, di antaranya: *Locality development, Social planning,* dan *Social action* dengan pendekatan *Casework, Groupwork, Community Organization* dan atau *Community Development*. Berdasarkan model/pendekatan tersebut, teknik yang digunakan, antara lain *penyuluhan, perencanaan sosial, penyelidikan, advokat,* dan *recording. S*trategi yang digunakan *berbasis individu, keluarga,* dan *masyarakat.* Proses yang dilakukan pada masing-masing tahapan dilengkapi dengan kegiatan yang berstruktur dan terencana, dengan alat atau perlengkapan yang digunakan adalah diskusi, wawancara dan pembimbingan dengan penilaian, pemberian motivasi, dan tindak lanjut. Ukuran Keberhasilan layanan dalam pencegahan terulangnya konflik, antara lain: hilangnya faktor-faktor yang menimbulkan konflik; berkurangnya faktor-faktor yang menimbulkan konflik; tidak terulangnya kembali konflik; terhambatnya perkembangan konflik; adanya persiapan dari masyarakat untuk menghadapi terulangnya konflik.

Pengembangan Pasca Penanganan Korban konflik

Pengembangan pasca-penanganan korban bencana konflik merupakan kegiatan penguatan melalui memulihkan korban bencana setelah mereka mengalami pengungsian, baik yang kembali ke tempat asal, berbaur dengan masyarakat lokal di mana mereka mengungsi, atau di relokasi. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk:

(a) Meningkatkan kondisi ekonomi korban bencana

(b) Meningkatkan integrasi sosial, solidariti sosial, dan toleransi sosial antar korban bencana dengan masyarakat asal atau masyarakat lokal.

Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dalam upaya pengembangan pasca penanganan korban bencana konflik seperti ini perlu melibatkan unsur-unsur: Dinas Sosial atau kesejahteraan sosial kota/kabupaten atau dinas lain yang melaksanakan fungsi usaha kesejahteraan sosial; Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kota/kabupaten atau badan lain yang melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik lokal mahupun regional; forum warga iaitu suatu wadah kegiatan masyarakat yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur dan lapisan warga masyarakat; dan Instansi lain yang melaksanakan upaya penanganan korban bencana tingkat kabupaten dan kota. Beberapa hal yang penting dalam pengembangan pasca penanganan korban konflik diarahkan pada kegiatan-kegiatan:

(a) Peningkatan ekonomi korban bencana antar warga masyarakat
(b) Peningkatan integrasi dan solidariti sosial, toleransi sosial antar warga masyarakat

Sistem pelaksanaan dalam pengembangan pasca penanganan korban konflik ini adalah masyarakat, melalui “Forum Warga”. Forum dalam sistem pelaksana perubahan ini berfungsi untuk:

(a) Melakukan pertemuan rutin.
(b) Menyusun rencana dan aksi bersama.
(c) Memelihara keberhasilan yang telah dicapai.
(d) Melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan yang berlangsung.
(e) Menyempurnakan kegiatan.[12]

Selain itu, pihak lain yang terlibat adalah Dinas sosial atau kesejahteraan sosial kota/kabupaten; Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kota/kabupaten atau badan lain yang melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat Lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik lokal mahupun regional;l Instansi lain yang melaksanakan upaya penanganan korban bencana tingkat kota/kabupaten yang selayaknya hanya bertindak sebagai fasilitator.

Dalam menentukan kegiatan utama dalam pencegahan, antara lain dilakukan: penyuluhan sosial tentang bencana akibat konflik, dimaksudkan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap bencana konflik serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Dari kegiatan ini diharapkan terjadi perubahan perilaku masyarakat, antara lain dapat dilakukan melalui kampanye tentang bencana akibat konflik, mengupayakan penyedaran serta penggalang partisipasi masyarakat dalam setiap permasalahan konflik, sekali gus memantapkan ketahanan sosial masyarakat dengan mengupayakan dan memperkuat organisasi ataupun kelompok yang ada di tengah masyarakat dengan segala potensi yang dimilikinya.

Sistem Sasaran dan Pendukung Pelaksanaan

- Para korban bencana kerusuhan dan masyarakat asal atau masyarakat lokal meliputi: para tokoh masyarakat, para kepala keluarga, para ibu rumah tangga, dan para pemuda.
- Tenaga fasilitator yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum warga.
- Stimulus, baik berupa dana, sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum warga.
- Penyeliaan (supervisi) terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum warga.

Teknik Pengembangan Pasca Penanganan Korban Konflik

Pemetaan Sosial

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya informasi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat korban bencana, termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya lokal, institusi lokal, serta organisasi-organisasi lain yang ada di wilayah tempat tinggal mereka. Penggunaan teknik *Pemetaan sosial* ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- *Pendefinisian konsep*
  Untuk menyamakan persepsi tentang masalah, kebutuhan, dan potensi, perlu dilakukan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan kelompok terkait.
- *Menemu kenali masalah*
  Kegiatan adalah memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengidentifikasikan kondisi, situasi, dan masalah sosial di sekitar mereka serta upaya-upaya apa yang telah dilakukan dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi.
- *Menemu kenali potensi*
  Kegiatan ini adalah memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengidentifikasikan potensi yang dimiliki, sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk menyusun rencana pemecahan masalah. Potensi-potensi yang harus diketahui antara lain adalah:
  - *Local knowledge*
    Pengetahuan masyarakat tentang alam, spiritual, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kesedaran mereka terhadap kekayaan yang mereka miliki.
  - *Local skill*
    Keterampilan yang dimiliki masyarakat. Dengan memahami keterampilan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengatasi masalah sesuai dengan tingkat kemampuannya.
  - *Local culture*
    Mengenali adat istiadat, nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dianuti oleh masyarakat yang dapat dijadikan sumber kekuatan bagi pemecahan masalah.
  - *Local process*
    Mengidentifikasikan bagaimana masyarakat melakukan diskusi, pertemuan-pertemuan, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, melakukan kegiatan bersama, dan sebagainya.
  - *Local power*
    Mengidentifikasikan sumber-sumber kekuatan yang dapat mempersatukan masyarakat karena karismatik, seperti, kedudukan terhormat kesultanan, tempat keramat, dan lain-lain.
  - *Local institution*
    Mengidentifikasikan berbagai institusi lokal yang ada di lingkungan tempat tinggal, seperti kelompok pemuda, kelompok kekerabatan, kelompok arisan, kelompok pengajian, dan sebagainya.

Menyusun Rencana Aksi Secara Partisipatif

Menyusun rencana aksi secara partisipasif merupakan teknik yang efektif guna menggerakkan kelompok untuk membuat rancangan tindak yang nyata dalam kurun waktu disertai dengan tugas dan tanggung jawab yang diuraikan secara rinci. Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi ini meliputi tujuh langkah kegiatan dapat dilihat seperti Jadual 4 di bawah;

Jadual 4: Tahap Kegiatan Rencana Aksi Secara Partisipatif

Tahap Kontak	• Menjelaskan aktiviti yang akan direncanakan • Menjelaskan proses yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan • Menjelaskan rentang waktu untuk aktiviti yang akan dijalankan • Pancing partisipasi peserta
Tahap lingkaran sukses	• Menanyakan pada kelompok tentang kondisi yang ingin dicapai ketika aktiviti selesai, serta apa yang ingin dirasakan, dilihat, atau didengar dari orang lain ketika aktiviti selesai • Membuat daftar respons yang didapati dari diskusi. Sebut ini LINGKARAN SUKSES
Tahap Kondisi Objektif	• Menanyakan pada kelompok tentang kekuatan dan kelemahan kelompok saat ini, serta kemungkinan keuntungan dan kerugian yang akan dialami kelompok sebagai akibat dari rencana yang akan dijalankan • Membuat daftar respons yang didapati dari diskusi, sebut KONDISI OBYEKTIF
Tahap *Workshop*	• Melakukan *workshop* untuk menemu kenali semua Agenda Tindakan (seperti metode *workshop* yang dilakukan sebelumnya) • Membentuk beberapa Kelompok Kecil sesuai Agenda Tindakan yang diperoleh • Meminta setiap kelompok kecil untuk melakukan pemeriksaan ulang atas ide-ide kegiatan yang dihasilkan *workshop* • Meminta setiap kelompok kecil untuk memperbaiki atau memilih ide-ide kegiatan tersebut sehingga setiap ide kegiatan menjadi masuk akal untuk dikerjakan • Meminta kelompok kecil menyusun rencana tindakan berdasarkan ide-ide kegiatan menjadi rencana kegiatan yang tersusun secara logis dan kronologis. • Meminta kelompok kecil mengklasifikasikan rencana tindakan tersebut dalam kategori-kategori: Agenda Tindakan, Aktiviti per Periode dan tentukan pula *Indikator* Keberhasilan (lihat di tabel kegiatan). • Hasil dari kerja kelompok kecil adalah RINCIAN TUGAS.
Tahap Penjadualan dan Penugasan	• Membuat tabel kalender kegiatan • Meminta peserta menyusun kartu-kartu ide tersebut dalam tabel kalender kegiatan. • Meminta seorang perwakilan dari setiap kelompok kecil menjelaskan setiap kegiatan (yang ditempelkan di kalender). • Meminta kepada forum untuk menilai secara kritis: kegiatan apa yang diperlukan tetapi belum dibahaskan, tambahkan kegiatan yang diperlukan tersebut pada tabel kalender.
Tahap Refleksi	• Menanyakan kepada seluruh peserta apakah ada yang masih perlu disempurnakan dari hasil yang dicapai. • Menegakkan komitmen yang telah disepakati peserta.

Sumber: Tumanggor, Rusmin, Jaenal Aripin, & Imam Soeyoeti (2004); Bappeda Provinsi Kalimantan Barat (2004); Dinas Sosial Kabupaten Sambas (2004); Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia (2005).

Kegiatan di atas bertujuan untuk *mendorong masyarakat memberikan sumbang saran dan pemikiran serta berpatisipasi dalam merumuskan perencanaan yang jelas. memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendefinisikan berbagai variasi tugas masing-masing anggota masyarakat yang terperinci dalam perencanaan kerja, memberi*

kemudahan kepada masyarakat agar dapat menyusun dan menyepakati pembahagian tugas masing-masing anggota masyarakat dengan kesedarannya sendiri, membantu masyarakat menentukan sasaran dan sumber atau potensi yang dapat dimobilisasikan guna menunjang kegiatan dalam perencanaan, dan meningkatkan kesedaran masyarakat dalam menuju kesepakatan bersama.[13]

Masalah dalam Penanganan Konflik

Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penanganan konflik di Kabupaten Sambas melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai daerah memiliki karakter tertentu.

Sosialisasi Perjanjian Damai dan Rawan Keamanan

Dalam upaya untuk mempertahankan hasil perjanjian damai di Sambas yang telah ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yang bertikai, selalu mengalami kegagalan, karena kerusuhan masih tetap terjadi. Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya jumlah personel yang berperan dalam sosialisasi hasil perjanjian damai, serta kurangnya tenaga keamanan untuk menjaga pelaksanaan perjanjian damai tersebut. Kendala di bidang keamanan, masih ada sebahagian warga masyarakat yang menyembunyikan senjata rakitan, sehingga tindak kejahatan masih sering terjadi. Kerawanan dalam bidang keamanan ini disebabkan masih lekatnya perasaan permusuhan antar kelompok yang terlibat konflik. Selain terbatasnya jumlah aparat keamanan jika dibandingkan dengan luasnya wilayah konflik merupakan kendala tersendiri dalam upaya pemulihan keamanan. Masalah lain yang menjadi kendala, adanya pihak-pihak tertentu (provokator) yang tidak menginginkan daerah-daerah konflik tersebut menjadi aman.

Selain itu, karakter suku Melayu yang kurang menerima sistem perwakilan. Segala kesepakatan perdamaian hasil kebersamaan para tokoh suku atau yang dianggap tokoh, baik dari suku Madura mahupun Melayu, tidak dapat mengikat perilaku suku Melayu. Suku Melayu memiliki karakter bahawa berbagai kesepakatan apa pun bentuknya, baik kesepakatan damai atau “gencatan senjata” harus melibatkan semua anggota masyarakat. Hal itu dibuktikan, tebalnya dokumen kesepakatan yang ditandatangani semua anggota masyarakat Melayu di Sambas.[14]

Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi Rakyat

Kondisi politik dan keamanan lokal yang belum pulih mengakibatkan pula belum pulihnya kondisi sosial ekonomi rakyat, seperti aset ekonomi berupa lahan-lahan pertanian yang terlantar di wilayah konflik. Kendala dalam mengatasi masalah sosial adalah kuatnya prasangka sosial dan stereotaip dari satu pihak kepada yang lain. Pada sisi lain, kemampuan pemerintah daerah setempat sangat terbatas untuk mengatasi masalah sosial dan sekali gus mendanai perbaikan berbagai sarana dan prasarana ekonomi rakyat dan kemudahan umum lainnya. Begitu pula dana pemulihan bagi korban kerusuhan hanya berlangsung untuk beberapa waktu.

Keterbatasan Anggaran dan Tenaga Profesional

Terbatasnya anggaran pemerintah untuk membangun kembali berbagai kemudahan umum, terutama pendidikan merupakan kendala yang dialami oleh daerah konflik di Kabupaten Sambas ini, di samping terbatasnya kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya akibat kerusuhan. Selain itu, banyak tenaga kependidikan yang enggan untuk kembali mengajar di daerah konflik karena khawatir kerusuhan terjadi lagi.

Kekurangan tenaga perubatan untuk ditempatkan di wilayah konflik mahupun memberikan pelayanan kesihatan di lokasi pengungsian, dan terbatasnya anggaran untuk menanggulangi masalah kesihatan menjadi kendala yang sulit diatasi dalam upaya penanganan kesihatan bagi korban kerusuhan. Umumnya di daerah-daerah konflik juga kekurangan tenaga ahli untuk melakukan penyembuhan mental bagi warga masyarakat yang mengalami trauma akibat kerusuhan ini.

Kesimpulan dan Saranan

Konflik Sambas di Kalimantan Barat Indonesia merupakan kerusuhan komunal, disebut juga konflik horizontal. Kerusuhan ini menimbulkan masalah; politik keamanan, sosial, ekonomi, dan psikologi bagi pihak-pihak yang bertikai, khususnya keluarga dan anak-anak. Bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, korban meninggal dunia akibat kerusuhan telah menimbulkan masalah-masalah *post traumatic stress disorder*. Konflik akibat kerusuhan horizontal ini telah mengakibatkan segregasi (fizik) dan perpecahan pada kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai. Konflik suku Madura-Melayu ini masih menyisakan “dendam”, tetapi berpotensi untuk “rujuk” kembali. Dendam dimanifestasikan dengan belum diterimanya suku Madura untuk kembali ke Sambas, sehingga upaya rekonsiliasi selalu gagal. Potensi rujuk masih besar, karena hubungan mereka menyisakan kedekatan emosi dalam kenangan hidup bertetangga dan dalam ikatan pernikahan silang. Pola penanganan konflik sebahagian besar telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun baru pada tingkatan tertentu. Namun setidak-tidaknya, telah dilakukan untuk meredam situasi konflik walaupun masih bersifat sementara; melalui upaya penanganan rekonsiliasi mahupun upaya-upaya lainnya, seperti penempatan semula masih berada di luar *locus*, baik dari pihak pemerintah mahupun non-pemerintah. Masih sedikit perubahan-perubahan yang berasal dari masyarakat lokal (*change from below).* Korban kerusuhan mengharapkan kepada pemerintah agar tetap ada jaminan keamanan, dan terwujudnya rekonsiliasi dan kemudahan umum di tempat penempatan semula. Terhadap masyarakat lokal, korban kerusuhan terhadap masyarakat tidak mudah terprovokasi, menjaga agar tidak timbul kembali kerusuhan melalui kerjasama antar masyarakat. Bagi masyarakat di luar lokasi kerusuhan agar dapat memberikan bantuan.

Menstimulasi perubahan dari bawah (*change from below*). Upaya ini memerlukan *change agent profesional* yang memiliki kelayakan, seperti *community development worker* (CD worker) yang bekerja bersama institusi-institusi lain dan masyarakat, membentuk sebuah tim, bekerja secara simultan melakukan berbagai aktiviti dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, terkait pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, psikologi, dan budaya. Penguatan pada keluarga-keluarga (*strengthening families*)

dalam berbagai aspek kehidupan, sosial-ekonomi-psikologis-budaya, sehingga memiliki ketahanan dalam aspek-aspek tersebut. Pada suatu saat, penguatan terhadap keluarga dapat mengakibatkan ketahanan dalam masyarakat, seperti pengembangan nilai trust dalam masyarakat, dan mempublisitikan kegiatan bersama di antara suku Madura dan Melayu dalam berbagai program pembangunan dengan suasana kekeluargaan yang damai melalui media cetak dan elektronik. Menghidupkan kembali karakter karismatik yang dapat dijadikan acuan perilaku bagi kedua suku (Madura-Melayu) seperti penobatan Sultan Sambas perlu dikembangkan, dan diberi kesempatan untuk menyatukan kembali suku yang bertikai dalam koridor silaturahmi, tidak dalam pendekatan formal rekayasa pemerintah. Penyelesaian masalah re-evakuasi pengungsi, baik melalui penempatan semula mahupun rekonsiliasi (bila mungkin), sebab penyelesaian masalah pengungsi terkait dengan penyelesaian masalah-masalah lainnya, seperti kegiatan-kegiatan ekonomi (memfungsikan kembali pasar, pertokoan, dan lain-lain), perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kegiatan belajar-mengajar, perbaikan sarana dan prasarana kesihatan, rekonstruksi tata kota, dan lain-lain. Upaya berencana dan sistematis untuk meningkatkan kesedaran berbangsa dan bernegara karena persoalan bangsa belum selesai. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan baik sektor mahupun lintas sektor.

Secara keseluruhannya, menangani konflik tidak sederhana, karena harus didasari pada falsafah, paradigma, pendekatan (*model*) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Rekomendasi, perlu kajian dari tingkatan falsafah dan prinsip-prinsip kerja, pendekatan saintifik/akademik sampai memilih dan menentukan penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat operasional. Hal ini akan efektif dalam spektrum yang luas, bila dibangunkan atas asas transparensi dan akauntabiliti, hingga mampu memulihkan masyarakat bersama instansi pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan mahupun antar instansi aparat keamanan sendiri. Koordinasi tersebut dapat terjadi secara vertikal mahupun horizontal.

Rujukan

Azra, Azyumardi (Ed.) *Agama dalam Keragaman Etnik di Indonesia.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI.,1998.

Bohm, RP.C.J. Fatlolon, Dkn Costan, Fr.Pr (eds.) *Lintasan Peristiwa Kerusuhan Maluku tahun 1999-2002,* Ambon: Keuskupan Amboina, 2002.

Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan.* Jakarta: Kanisius, 1994.

Chambersa, Robert. *Rural Development: Putting the Last First.* London: Longman Inc., 1983.

Departemen Kominfo, *Dokumen elektronik Sisfonas 2010 sebagai tulang punggung Aplikasi e-Government,* www.depkominfo.go.id, (2002)

Ecip, S. Sinansari, Darwis Waru, Alip Yog Kunandar. *Rusuh Poso Rujuk Malino.* Jakarta : Cahaya Timur, 2002.

Edi Patebang & Eri Sutrisno. *Konflik Etnis Di Sambas.* Jakarta : Institut Studi Arus Informasi, 2000.

Fath. Zakaria. *Mozaik Budaya Orang Mataram.* Mataram : Sumurmas Al Hamidy, 1998.

Fisher, S., dkk. *Mengelola Konflik, Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak,* Jakarta,The British Council, 2000.

Fukuyama, Francis. *The Great Disruption.* New York : Touchtone Ltd., 1999.

Germani, Gino (ed.) *Modernization, Urbanization, and the Urban Crisis.* Boston: Little, Brown and Company, 1973.

Giddens Anthony, David Held. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, Kelompok, dan Konflik : Teori Sosial Kontemporer.* Jakarta : CV Rajawali, 1982.

Hartono, Harry S. *Kerusuhan Antaretnis Penyebab dan Dampaknya Terhadap Guru dan Siswa (Kasus Kerusuhan di Kab. Sambas. Kalimantan Barat).* Jakarta: Depdiknas RI. (www.depdiknas.go.id)

Ignas Kleden, John Julaman. *Timur dan Barat di Indonesia Perspektif Integrasi Baru.* Jakarta : The Go-East Institute, 2000.

Jim Ife. *Community Development: Community Based Alternatives In An Age Of Globalization.* Australia : Cath Godfery, 2002.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1980.

Lambang Triono. *Keluar Dari Kemelut Maluku.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

"Pengungsi Sambas Menyerbu Kantor Bappeda Kalbar". Laporan Daerah. Liputan 6 SCTV. 2004. www.sctv.co.id.

Ma'arif Jaimun. *Manual Advokasi Resolusi Konflik: antara etnik dan agama.* Kartasura Solo : Ciscore,1999.

Musa, Pabali H.. *Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat: Kajian Naskah Raja-Raja dan Silsilah Raja Sambas*. Pontianak: STAIN Pontianak Press,2003

Naskah Inpres No 6, tahun 2003 , www.ri.go.id

Pemerintah Kabupaten Sambas. *Kabupaten Sambas Dalam Angka (Sambas Regency in Figures)*. Sambas: Terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas, 2002.

"Penanganan Pengungsi Sambas Butuh Waktu Lama*". . Kompas* 25 April 2001.

Ratna Megawangi. *Membiarkan Berbeda.* Bandung : Mizan, 1999.

"Ribuan Pengungsi di Kalbar Terancam Tak Ikut Pemilu 2004." *Kompas*, 07 April 2003.

Saad, Munawar M. *Sejarah Konflik Antar Suku di Kabupaten Sambas.* Pontianak: Kalimantan Persada Press, 2003.

Santoso, Budi. *Tragedi Sambas Menurut Antropolog dan Sosiolog*. Kompas, 1988.

Sinansari ecip, S., Darwis Waru, Alip Yog Kunandar. *Rusuh Poso Rujuk Malino.* Jakarta : Cahaya Timur, 2002.

"BATHO PELE - putting people first" dalam South Africa Government Online, www.gov.za/index.html

Tadjoeddin, Muhammad Zulfan. *Anatomy of Social Violence In The Context of Transition.* Jakarta : UNSFIR, 2002.

Taufiq A. Tuhana. *Konflik Maluku.* Yogyakarta : Gama Global Media, 2000.

Tumanggor, Rusmin, Jaenal Aripin, & Imam Soeyoeti. *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat di tanah Air*. Jakarta: LEMLIT dan LPM UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan BALATBANGSOS Depsos RI., 2004.

Wallace A. Ruth, Alison Wolf. *Contemporary Sosiological Theory: Continuing The Classical Tradition.* Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs. New Jersey, 1986.

Laporan/Kertas kerja:

Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. "*Gambaran Umum Penanganan Pengungsi di Kalimantan Barat."* Pontianak, 2004.

Departemen Kominfo, "*Dokumen elektronik Sisfonas 2010 sebagai Tulang Punggung Aplikasi e-Government."* www.depkominfo.go.id, 2002

Dinas Sosial Kabupaten Sambas. "*Laporan Penanggulangan Pasca-Konflik Sambas."* Sambas, 2004.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. "*Laporan Penanggulangan Pasca-Konflik Sambas*." Sambas, 2004.

Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Barat. "*Laporan Penanggulangan Korban Kerusuhan Sosial Kabupaten Sambas."* Pontianak, 1999.

Laporan Kajian Kerusuhan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara barat, dan Sulawesi Tengah), Pusat Kajian Pengungsi, Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung,2002.

Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (2005).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. "*Laporan Wakil Gubenur Kalimantan Barat Tentang Penanganan Pengungsi di Provinsi Kalimantan Barat."* Pontianak, 2002.

Pemerintah Kabupaten Sambas. "Laporan Penanggulangan Pasca Konflik Sambas." Sambas, 2004.

Pemerintah Kabupaten Sambas. "*Company Profile*." Sambas, 2004.

Polres Sambas. "*Laporan Tingkat Kriminal di Sambas*." Sambas, 2004.

Tim Monitoring Ikatan Sosiologi Indonesia Cabang Pontianak. *"Laporan Monitoring, Penelitian dan Evakuasi Pelaksanaan Penanganan Pengungsi Korban Kerusuhan di Penampungan Wilayah Kalimantan Barat*." Pontianak, 2002.

---

[1] Taufiq A. Tuhana, *Konflik Maluku* (Yogyakarta : Gama Global Media, 2000).

[2] Tumanggor, Rusmin, Jaenal Aripin, & Imam Soeyoeti. *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat di tanah Air*. Jakarta: LEMLIT dan LPM UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan BALATBANGSOS Depsos RI., 2004.

[3] Ratna Megawangi. *Membiarkan Berbeda.* Bandung : Mizan, 1999.

[4] Tumanggor, Rusmin, Jaenal Aripin, & Imam Soeyoeti. *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat di tanah Air*. Jakarta: LEMLIT dan LPM UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan BALATBANGSOS Depsos RI., 2004. Secara empirik, lihat - Laporan Kajian Kerusuhan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara barat, dan Sulawesi Tengah), Pusat Kajian Pengungsi, Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, 2002.

[5] Taufiq A. Tuhana, *Konflik Maluku* (Yogyakarta : Gama Global Media, 2000); lihat juga, Tumanggor, Rusmin, Jaenal Aripin, & Imam Soeyoeti. *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat di*

tanah Air. Jakarta: LEMLIT dan LPM UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan BALATBANGSOS Depsos RI., 2004; Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (2005).

[6] Model krisis ini berazaskan pendekatan Social work yang diimplementasikan dalam sistem penanganan konflik atau bencana. Lihat, Ma'arif Jaimun. *Manual Advokasi Resolusi Konflik: antara etnik dan agama.* Kartasura Solo : Ciscore,1999; Giddens Anthony, David Held. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, Kelompok, dan Konflik: Teori Sosial Kontemporer.* Jakarta : CV Rajawali, 1982; Tadjoeddin, Muhammad Zulfan. *Anatomy of Social Violence In The Context of Transition.* Jakarta : UNSFIR, 2002; Laporan Kajian Kerusuhan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara barat, dan Sulawesi Tengah), Pusat Kajian Pengungsi, Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, 2002; Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (2005).

[7] ibid.
[8] ibid
[9] ibid
[10] ibid
[11] ibid
[12] Ibid

[13] Laporan Kajian Kerusuhan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara barat, dan Sulawesi Tengah), Pusat Kajian Pengungsi, Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, 2002; Laporan Kajian Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Berpotensi Konflik di Indonesia, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (2005).

[14] Perjanjian ini, substansinya tersebar dalam pelbagai laporan kajian, lihat: Musa, Pabali H.. *Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat: Kajian Naskah Raja-Raja dan Silsilah Raja Sambas*. Pontianak: STAIN Pontianak Press,2003; Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. "*Gambaran Umum Penanganan Pengungsi di Kalimantan Barat."* Pontianak, 2004; Dinas Sosial Kabupaten Sambas. "*Laporan Penanggulangan Pasca-Konflik Sambas."* Sambas, 2004; Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. "*Laporan Penanggulangan Pasca-Konflik Sambas*." Sambas, 2004; Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Barat. "*Laporan Penanggulangan Korban Kerusuhan Sosial Kabupaten Sambas."* Pontianak, 1999; *Laporan Kajian Kerusuhan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara barat, dan Sulawesi Tengah*), Pusat Kajian Pengungsi, Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung,2002.